



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDIA RAMLI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 799838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.600.000.000
2. Tanah Seluas 76 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 856.500.000

1. MOTOR, HONDA NC1181C AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 202.606.705

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 6.164.106.705

III. HUTANG Rp. 664.820.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.499.286.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.